

Nama : Maya Khoyrotun Nisa

NPM : 2413031045

Kelas : 2024 B

Mata kuliah: Teori Akuntansi

Tugas : Case Study

Pertanyaan:

1. Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.
2. Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:
 - Tujuan laporan keuangan
 - Karakteristik kualitatif informasi
 - Basis pengukuran
 - Asumsi entitas dan kelangsungan usaha
3. Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia.

Jawaban:

1. Keputusan PT Garuda Sejahtera menggunakan nilai wajar dapat dibenarkan secara konseptual berdasarkan PSAK dan IFRS karena memberikan informasi yang relevan dan mendukung konvergensi dengan standar internasional. Namun, implementasi dalam konteks Indonesia menghadapi tantangan utama berupa

keterbatasan pasar modal domestik yang memaksa penggunaan input Level 3 yang subyektif, volatilitas ekonomi tinggi yang menciptakan ketidakpastian penilaian, dan biaya implementasi yang besar dengan manfaat terbatas mengingat pemahaman pengguna laporan keuangan masih rendah.

Keputusan ini dapat dibenarkan jika perusahaan beroperasi di sektor dengan pasar aktif atau memiliki strategi investasi jangka pendek, disertai sistem pengendalian internal yang kuat dan pengungkapan yang transparan. Meskipun secara konseptual sejalan dengan kerangka PSAK dan IFRS, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan spesifik Indonesia dan memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi stakeholder.

2. Perbandingan Kerangka Konseptual PSAK dan IFRS

Aspek	Kerangka Konseptual PSAK	Kerangka Konseptual IFRS
Tujuan Laporan Keuangan	Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain dalam pengambilan keputusan ekonomi	Menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan
Karakteristik Kualitatif Informasi	Relevansi, reliabilitas, netralitas, keterbandingan, konsistensi	Relevansi, representasi wajar (faithful representation), keterbandingan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dapat dipahami
Basis Pengukuran	Kombinasi nilai wajar, biaya historis, dan basis lain yang sesuai konteks	Lebih menekankan nilai wajar sebagai basis pengukuran utama, tapi juga mengakomodasi biaya historis dan basis lain

Asumsi Entitas dan Kelangsungan Usaha	Asumsi kelangsungan usaha menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, dengan pemeriksaan ketidakpastian	Asumsi kelangsungan usaha adalah dasar utama kecuali ada indikasi sebaliknya, dengan penekanan pada pengungkapan ketidakpastian tersebut
---------------------------------------	--	--

- Menurut saya, Indonesia sebaiknya tidak mengikuti sepenuhnya IFRS tanpa penyesuaian lokal karena kondisi spesifik yang berbeda dengan negara maju. Secara ekonomi, struktur yang didominasi UMKM 99% berbeda dengan perusahaan multinasional besar. Kompleksitas IFRS menjadi tidak praktis dan berbiaya tinggi untuk pelaku usaha domestik, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasar modal Indonesia yang masih berkembang dengan likuiditas terbatas membuat konsep seperti nilai wajar tidak reliable dan dapat menghasilkan informasi menyesatkan. Tingkat literasi keuangan dan pemahaman stakeholder terhadap kompleksitas IFRS juga masih terbatas, sementara kematangan institusi pendukung seperti sistem hukum dan enforcement belum setara dengan negara maju. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah konvergensi bertahap dengan penyesuaian lokal yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan kematangan pasar Indonesia. Hal ini memungkinkan pemanfaatan manfaat IFRS dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan daya saing internasional, sambil mempertahankan relevansi dan praktikalitas melalui penyesuaian pada area seperti pengukuran nilai wajar, pengakuan pendapatan industri spesifik, dan penyederhanaan untuk entitas kecil menengah.